

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT**

#### **DI ERA KEPEMIMPINAN GEORGE W. BUSH DAN BARACK OBAMA**

Pada bab kedua kali ini penulis akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang telah terjadi pada era kepemimpinan George W. Bush dan Barack Obama. Munculnya kebijakan yang dilatarbelakangi oleh peristiwa yang mengakibatkan perlu adanya kebijakan. Seperti halnya tragedi WTC yang terjadi pada masa kepemimpinan Bush 2001 silam yang membuat pemimpin Amerika Serikat pada saat itu membuat beberapa kebijakan yang mengatasnamakan menjaga keamanan dan stabilitas negara Amerika Serikat. Khususnya pada kebijakan mengenai War On Terror serta kebijakan terkait visa mengunjungi Amerika Serikat pada masa Bush junior dan Barack Obama.

#### **A. Kebijakan War on Terror Era Kepemimpinan George W. Bush**

Tidak dipungkiri adanya globalisasi dewasa ini turut berkontribusi akan lahirnya suatu bentuk ancaman bagi keamanan baru bagi negara, di beberapa bidang misalnya sosial budaya, globalisasi kini memberikan fasilitas kepada seseorang tidak terikat pada kewarganegaraan, sehingga terciptanya kebersamaan bukan berdasarkan pada wilayah, namun melalui ikatan-ikatan emosional, hak asasi manusia maupun demokrasi. Maka dari itu, proses integrasi sulit dikendalikan dan pada masanya negara yang memiliki teknologi yang canggih dan mutakhir mampu memberikan pengaruhnya. Pada bidang militer, globalisasi menyebarkan jaringan hubungan dan keterikatan militer dunia, sehingga muncul suatu inovasi teknologi militer yang merupakan salah satu upaya untuk merekayasa dunia kepada wilayah geostrategik tunggal (*single geostrategic space*). Di lain

bidang seperti ideologi, globalisasi mampu membuka batasan-batasan identitas budaya, nilai bangsa, yang kemudian dapat melemahkan semangat nasionalisme. Dari keseluruhan ini mendukung munculnya isu keamanan baru yang berupa meningkatnya kejahatan transnasional yang tidak lain dan bukan adalah terorisme (Riau, 2012).

Terorisme telah menjadi suatu bentuk aktivitas yang sangat mengancam bagi stabilitas dan keamanan internasional, teror yang dibuat sedemikian rupa oleh beberapa gerakan yang mengatasnamakan fundamental ideologi telah menempatkan diri dalam ketakutan yang mampu memberikan dampak yang signifikan bagi keamanan dan rasa nyaman dunia internasional. Terlebih transnasionalis terorisme yang terorganisir dan mengancam secara langsung keselamatan warga negara yang mana teror tersebut berlangsung. Kemudian muncul kebijakan mengenai upaya untuk pemberantasan segala macam tindakan maupun aktivitas terkait terorisme atau yang lebih sering dikenal sebagai "*War on Terror*"

## **1. Tragedi WTC 11 September 2001**

Amerika Serikat sempat dikejutkan ketika terjadinya 11 September 2001 yaitu peristiwa pemboman gedung World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat, peristiwa tersebut kemudian menjadi isu yang global terkait ancaman terorisme. Pasca terjadinya peristiwa tersebut Amerika Serikat adalah satu dari sekian banyaknya negara lain yang merasakan ketakutan dan rasa keamanan nasionalnya terancam oleh tindakan para pelaku teror. Dibawah pimpinan George W. Bush yang kemudian mendeklarasikan "*Global War on Terror*" atau yang lebih dikenal dengan istilah "*Counterterrorism*". Suatu bentuk dari kesepakatan dan usaha kerjasama bersama yang dibuat pemerintah dalam hal melawan dan memerangi teroris, serta ditujukan kepada semua bentuk teroris islam internasional yang telah berhasil menarik perhatian dunia (Williams, 2008).

Kelompok teroris radikal yang terhitung sangat berbahaya dan menjadi penanggung jawab atas peristiwa yang telah menimpa pada 11 September 2001 lalu ialah Al-Qaeda, yang dikenal sebagai salah satu kelompok yang tidak berbasis negara. Awal mula terbentuknya Al-Qaeda sebagai kelompok teroris ini sangat nyata ancamannya terhadap negara di dunia barat bahkan berdampak langsung kepada negara di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang kerap menjadi target sasaran kelompok terorisme internasional, hingga saat ini banyak sekali kasus teror yang terjadi di beberapa tempat di Amerika Serikat, baik dilakukan di dalam maupun di luar negeri yang menyisakan korban warga Amerika Serikat. Diawali pada tahun 1992 terjadi aksi pengeboman di sebuah hotel di kawasan Yaman yang didominasi oleh penghuni warga Amerika Serikat, tahun 1993 kasus pengeboman di gedung World Trade Center New York, di tahun yang sama yakni 1993 di Kampung Militer Riyadh, Arab Saudi, kemudian pada tahun 1996 basis militer Amerika Serikat di Dahrn Arab Saudi, tahun 1998 di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kenya, kemudian pada tahun 2000 terjadi tragedi bom di kapal perang Amerika Serikat USS Cole di Yaman, dan peristiwa terakhir dan yang paling menggemparkan dunia terlebih pertahanan dan sistem keamanan di Amerika Serikat adalah pada serangan yang melanda World Trade Center di tahun 2001 silam (Anggoro, 2007).

Peristiwa serangan bom yang terjadi pada 11 September 2001 dan meluluhlantakkan gedung World Trade Center dan menyebabkan banyak kerugian serta banyaknya korban yang berjatuh dari tragedi tersebut. Tidak sedikit pun keluarga dari korban yang ditinggalkan menyampaikan aksi protes sehingga menimbulkan reaksi yang kuat dari Amerika Serikat khususnya Presiden George W. Bush yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin negara Amerika Serikat dalam periode waktu sejak 20 Januari 2001 sampai 20 Januari 2009, mendeklarasikan perang kepada kelompok teroris Al-Qaeda dan akan mengejar sampai dapat siapa dalang dibalik

kelompok tersebut yang akan menanggung atas segala kerugian yang ditimbulkan dari pengeboman gedung World Trade Center. Sebagaimana kita ketahui bahwa gedung World Trade Center tersebut adalah suatu simbol atas kekuatan negara Amerika Serikat, namun setelah terjadi peristiwa pengeboman tersebut maka muncul reaksi dari George W. Bush selaku kepala pemerintahan Amerika Serikat pada saat itu. Bush junior memberikan komando kepada pasukan militernya supaya meminimalisir tindak terorisme yang ada tentunya di dalam negaranya. Tidak hanya itu saja namun Bush juga mengambil sikap terhadap setiap pihak manapun yang turut andil dalam tragedi penyerangan gedung World Trade Center baik secara langsung maupun tidak, sedangkan dalang yang santer disebutkan adalah Osama bin Laden sebagai pelaku dari aksi terror tersebut, yang tidak lain merupakan pemimpin dari kelompok Al-Qaeda (Ritonga, 2001, hal. 86).

## **2. Munculnya Kebijakan Mengenai Terorisme**

Beberapa kebijakan yang diambil oleh George W. Bush selaku pemimpin negara Amerika Serikat pada masa itu antara lain adalah

- a) Mengisolasi setiap negara yang memberikan bantuan terhadap kelompok teroris supaya negara tersebut menghentikan bantuannya.
- b) Memperkuat tata peraturan dan landasan hukum yang berlaku dalam menangkal tindak teroris melalui beberapa kerjasama lingkup internasional.
- c) Bersikap tegas dan menampik upaya negosiasi yang dilakukan oleh kelompok terorisme.
- d) UU Patriot Act 2001, yaitu undang-undang yang berisi secara lantang mengumumkan melawan terorisme, dan segala bentuk kegiatan yang sifatnya mendukung atau menyinggung aksi terorisme akan dinyatakan dilarang, terlebih dalam perihal memberikan dukungan bahkan bantuan.

- e) Mendesak supaya PBB turut bertindak secara pasti dalam menangani masalah teroris, Amerika Serikat memiliki kesadaran bahwa usaha menangkal terorisme merupakan suatu yang harus dilakukan dengan cara kolektif agar berjalan efektif (Mubah, 2007, hal. 162).
- f) Kebijakan *Unilateralisme, Pre-emption strike* dengan doktrin *strike first*.<sup>1</sup>

### 3. Kebijakan Mengenai Visa era George W. Bush

Kebijakan George W. Bush yang kerap dinyatakan diskriminatif terhadap dunia islam tercermin dalam hal pengurusan visa, seperti misal saat mengeluarkan regulasi pemberian visa melalui syarat-syarat yang khusus untuk negara-negara tertentu, terutama dari negara muslim atau berkependudukan mayoritas muslim yakni harus menunggu selama 20 hari untuk mendapatkan visa, terlebih untuk laki-laki muslim yang berusia 18 hingga 40 tahun. Nyatanya waktu normal dalam mengurus visa Amerika Serikat hanya memakan waktu selama 14 hari (2 minggu). Adanya dugaan bahwa persoalan nama yang terdapat unsur islami menjadi kendala untuk masuk Amerika Serikat. Beberapa nama seperti yang dialami oleh warga negara Perancis tetapi namanya islami yaitu Said Mahrane dan Mohamed Youcef Mami. Kebijakan Bush tersebut merupakan kebijakan yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat, sementara kebijakan Bush yang dinilai diskriminatif ditujukan ke luar negeri antara lain mengenai kebijakan yang berkaitan dengan konflik Israel dengan Palestina. Tragedi 11 September 2001 menjadi suatu peristiwa yang begitu populer dan menjadi agenda Amerika Serikat terhadap ancaman teroris dalam pemerintahan Presiden

---

<sup>1</sup> Unilateralisme: Suatu tindakan yang tidak harus mendapat persetujuan dari badan internasional atau dari negara sekutu; pre-emption strike: suatu tindakan untuk menyerang terlebih dahulu sebelum diserang oleh negara lain terhadap segala bentuk potensi ancaman terhadap warga negaranya.

Bush saat itu. Setelah melakukan invansi ke Afghanistan selama dua tahun lamanya, kemudian Presiden Bush mmentukan lawan lain Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme, yaitu Irak. Dikarenakan Irak dan rezim otoriter dibawah pimpinan Saddam Hussein dianggap mendukung terorisme global (Pramesswara, 2011).

Bentuk diskriminasi, penindasan di tingkat domestik dan menargetkan komunitas Muslim sebagai sasaran, selain melanggar hak-hak asasi manusia juga merupakan tindakan yang kontraproduktif. Departemen Kehakiman telah membawa sebanyak 1.200 orang, dari segelintir orang tersebut diantaranya didominasi melakukan kesalahan pelanggaran kecil mengenai visa, menahan beberapa dari mereka selama berbulan-bulan tanpa adanya dakwaan apa pun. Hal tersebut telah memunculkan adanya dakwaan balik pada tuntutan yang berkaitan dengan terorisme. Orang-orang yang ditahan itu adalah orang yang berasal dari mereka yang telah sukarela datang menawarkan bukti ke FBI. Penahanan yang dilakukan terhadap mereka ini adalah sebuah aksi yang hampir dapat dipastikan berdampak pada sesuatu yang mengerikan, sehingga akan menutup tingkat keberhasilan dari setiap usaha yang diberikan dari komunitas yang menjadi sasaran (mayoritas dari mereka adalah orang-orang keturunan Arab dan Asia Selatan) yang awalnya bersungguh-sungguh ingin membantu penyelidikan. Akan tetapi, kebijakan luar negeri Bush lah yang justru merusak paling banyak dan mengeluarkan terlalu banyak anggaran di setiap tindakan dalam menghadapi terorisme Al-Qaeda.

Perang terhadap Afghanistan inilah yang dinilai semata-mata hanya sebagai latihan antiteroris merupakan kegagalan paling buruk. Pertama karena jika hanya akan menangkap seorang, ekstradisi adalah cara yang paling tepat dan sukses dibandingkan menggunakan cara perang. Cara menjatuhkan bom yang beratnya sampai mencapai 2.000 pon bukanlah cara yang tepat untuk mencari dan menemukan penjahat. Cara tersebut justru akan melenyapkan orang-orang

yang bahkan tidak bersalah ikut terbunuh, kekacauan yang ditimbulkan serta ratusan ribu pengungsi baru yang terjadi karena pegeboman akan menyebabkan beberapa rombongan kecil terorganisir dengan baik untuk dapat mengendap-endap keluar. Dan sesungguhnya bahwa perang tidak akan menimbulkan kekhawatiran terhadap Osama bin Laden ataupun kepada setiap pemimpin tinggi tingkat Al-Qaeda lainnya, meskipun Mohammed Atef yang merupakan salah satu pemimpin militernya terbunuh. Sebetulnya beberapa anggota dari Al-Qaeda yang paling memiliki pengaruh adalah seperti Abu Zubaydah dan Khalid Shaikh Mohammed, yang telah tertangkap tangan hanya dikarenakan razia rutin operasi polisi yang sama sekali tidak dramatis (Mahajan, 2005).

Program Pelepasan Visa (Visa Waiver Programme / VWP), yang memungkinkan orang asing dari negara-negara tertentu untuk memasuki Amerika Serikat tanpa visa kurang dari 90 hari, telah berkembang dari program percontohan yang membantu industri pariwisata dan memperkuat hubungan diplomatik dengan salah satu program terpenting yang mempengaruhi Keamanan AS dan ekonomi AS. VWP telah memungkinkan industri perjalanan menjadi komponen penting dalam usaha nasional untuk membangun kembali ekonomi Amerika Serikat yang sedang berjuang. Tentu saja, program ini menghadapi tantangan yang signifikan, terutama setelah serangan 11 September 2001, ketika kebijakan imigrasi AS mulai mengambil pendekatan yang lebih keras untuk mengatasi kesenjangan yang dirasakan dalam keamanan di negara asal Amerika Serikat. Satu dekade setelah peristiwa 9/11, VWP sekarang harus berevolusi lebih jauh dan lebih baik untuk memastikan bahwa kontribusi keamanan dan dampak ekonominya dimaksimalkan. Perubahan ini mengharuskan Eksekutif Cabang, Kongres, dan publik AS menilai keseimbangan pertumbuhan ekonomi, hubungan diplomatik, dan keamanan nasional yang melekat dalam perjalanan internasional.

Sejarah Program Pelepasan Visa pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga era: fasilitasi (dari tahun 1988 sampai peristiwa 9/11), kelangsungan hidup (9/11 sampai 2006), dan penguatan (2006 sampai sekarang). Di setiap fase, kekuatan politik terkait dengan tiga masalah yang berbeda namun saling tumpang tindih - keamanan ekonomi, terorisme, dan imigrasi - telah berjuang untuk menciptakan VWP, dengan hasil yang berbeda selama setiap tahap. VWP pada awalnya dibuat pada tahun 1986 sebagai bagian dari Undang-Undang Reformasi dan Pengendalian Imigrasi tahun 1986. Program ini disusun sebagai program percontohan untuk membantu Departemen Luar Negeri memenuhi permintaan visa yang meningkat dari negara-negara dengan risiko pelanggaran imigrasi. Program ini dengan cepat menjadi prioritas utama industri perjalanan, yang menjadikannya sebagai cara untuk mempermudah perjalanan ke Amerika Serikat. Dalam UU Imigrasi tahun 1990, Kongres menetapkan batas awal delapan negara. Kongres terus mengutak-atik kriteria kelayakan dan metode di mana negara dapat ditempatkan pada status masa percobaan atau dikeluarkan dari program karena gagal memenuhi kriteria program, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Imigran dan Undang-Undang Tanggung Jawab Imigran Imigrasi tahun 1996.

Meskipun tidak ada pembajak 9/11 yang tiba di Amerika Serikat yang memanfaatkan proses VWP, serangan tersebut mengekspos kelemahan sistem skrining perbatasan AS yang menempatkan VWP dalam bahaya. Ketakutan yang meningkat tentang teroris yang berpotensi mengeksploitasi sistem imigrasi AS untuk melakukan lebih banyak serangan terhadap Amerika Serikat menempatkan VWP di bawah sorotan publik. Akibatnya, Kongres mengambil sejumlah tindakan untuk memperkuat persyaratan VWP untuk negara-negara peserta. Undang-Undang Patriot Amerika Serikat memindahkan batas waktu untuk paspor yang dapat dibaca mesin sampai tahun 2003 dan Undang-Undang Reformasi Entri Keamanan dan Visa yang disempurnakan pada Tahun



2002 mewajibkan biometrik, seperti sidik jari atau gambar wajah digital, menjadi bagian dari persyaratan paspor. Negara-negara VWP berjuang untuk memenuhi persyaratan ini, yang memicu negosiasi cukup besar antara Kongres dan Cabang Eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden George W. Bush, apakah akan memperpanjang tenggat waktu untuk standar paspor.

Di sisi lain, Kongres memiliki kekhawatiran serius tentang celah keamanan potensial yang disebabkan oleh VWP. Pada satu titik, Dewan Perwakilan Rakyat bersikeras bahwa kedua Sekretaris Negara Colin Powell dan Sekretaris Keamanan darat Tom Ridge bersaksi untuk perpanjangan batas waktu biometrik. Akhirnya, Kongres memperpanjang batas waktu biometri sampai tahun 2006, ketika semua negara VWP mampu mematuhi. Tinjauan negara VWP yang dilakukan setelah 9/11 meningkatkan taruhannya untuk mengevaluasi kepatuhan dan setidaknnya satu negara, Belgia, ditempatkan pada status masa percobaan pada tahun 2003 karena kekhawatiran keamanan paspor. Pada tahun 2004, Amerika Serikat mengembangkan kemampuan pendaftaran biometri untuk melakukan pengecekan daftar jam kerja sebagai bagian dari proses keluar masuk US-VISIT, yang menciptakan kepercayaan lebih pada keamanan program. Kesepakatan yang berhasil, meski tegang, antara Uni Eropa dan Pemerintahan Bush mengharuskan perusahaan penerbangan untuk menyediakan akses terhadap data penumpang pada tahun 2004 dan 2007 juga menangani banyak ketakutan skeptis terhadap pemeriksaan penumpang inbound yang tepat.

Pada akhir tahun 2006, Pemerintahan Bush berusaha memecahkan sejumlah masalah politik dengan mengusulkan agar VWP diubah untuk meminta otorisasi perjalanan online dan memberikan fleksibilitas untuk masuk ke negara-negara yang bekerja sama dalam War on Terror. Dengan Kongres Demokratik baru yang memprioritaskan undang-undang untuk menerapkan rekomendasi Komisi 9/11, Administrasi dapat

menegosiasikan penyertaan bahasa yang memungkinkan negara-negara dengan tingkat penolakan visa antara 3 dan 10 persen dipertimbangkan untuk masuk. Kewenangan pengabaian ini dikondisikan pada pelaksanaan review perjalanan online, yang dikenal sebagai Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan, dan sertifikasi oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) bahwa mereka telah menerapkan sistem akses keluar untuk mengidentifikasi individu-individu yang memiliki visa atau tetap berada di Amerika Serikat di luar 90 hari yang diizinkan di bawah VWP. Sistem entry-exit ini pertama kali dibuat berbasis nama, namun kemudian digantikan oleh sistem biometrik yang diimplementasikan sebagai bagian dari program US-VISIT di DHS, pada tanggal 30 Juni 2009 (C.Stewart Verdery, 2013, hal. 52)

## **B. Kebijakan Mengenai Teror dan Visa Era Kepemimpinan Barack Obama**

Barack Obama merupakan presiden Amerika Serikat ke 44 yang memimpin Amerika setelah berakhirnya masa jabatan George W. Bush. Presiden yang dilantik pada 20 Januari 2009 dan berasal dari partai Demokrat ini memiliki cara yang berbeda dalam hal kepemimpinannya. Ada banyak perubahan yang dijanjikan oleh Obama dan salah satunya yang terpenting bagi Amerika Serikat dan dunia merupakan pandangan dan perubahan pemikiran Obama mengenai Islam dan terorisme. Kemenangan yang diraih Obama tidaklah terlepas dari ide-ide perubahan yang diategaskan dan hal seperti itulah yang sudah tidak pernah lagi didengar oleh masyarakat Amerika Serikat sejak Presiden John F. Kennedy. Cara yang digunakan Obama dalam memberantas terorisme untuk menjaga negaranya supaya tetap aman dan damai yaitu menggunakan cara *smart power*, *smart power* merupakan perpaduan dari *hard power* dengan *soft power*. Terlihat sangat berbanding terbalik dengan cara yang digunakan dan adanya

perbedaan politik luar negeri oleh pemimpin sebelumnya yaitu George W. Bush yang lebih menekankan cara militer dan tergolong *offensive* kepada negara-negara yang diklaim sebagai tempat persembunyian kelompok teroris radikal yang berada di kawasan Timur Tengah (Guerlain, 2014).

Obama mempunyai tujuan untuk membuat keseimbangan terhadap situasi yang terjadi di Amerika Serikat mengenai kebijakan *War on Terror* yaitu dengan cara menggeser ideologi, perspektif, dan aliansi politik untuk memperkuat pertahanan Amerika Serikat. Obama menggunakan taktik pendekatan secara personal pada dunia muslim, contohnya melalui Al-Jazeera (jaringan berita televisi terbesar di Timur Tengah yang bertempat di Qatar). Obama berjanji akan menutup kamp tawanan di Guantanamo Bay di Kuba, mengurangi pasukan di Irak, serta menambah pasukan di Afghanistan. “Bagi dunia Muslim, Amerika akan melalui cara menciptakan hubungan yang baru dengan saling menghormati dan mengedepankan kepentingan bersama,” ucap Obama. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Obama untuk menepati janjinya tersebut antara lain pada implementasinya bahwa Obama tidak menggunakan cara kekerasan seperti yang dilakukan oleh kepala pemerintah sebelumnya yaitu era Bush junior. Obama telah menjalin hubungan diplomatik dengan Iran dan melakukan pertemuan dan membahas mengenai nuklir dengan Rusia, Obama juga berjanji akan mengakhiri kependudukan Amerika Serikat atas Irak.

Kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama antara lain adalah

1. Mengesahkan Undang-undang stimulus ekonomi, sebagai tanggapan terhadap resesi 2007-2009 di Amerika Serikat dalam bentuk American Recovery and Reinvestment Act of 2009.

2. Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act of 2010 (the White House, 2010).
3. Patient Protection and Affordable Care Act. Lebih kerap disebut Obamacare atau hukum layanan kesehatan federal (Holan, 2012).
4. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Yaitu UU yang mendukung stabilitas keuangan Amerika Serikat dengan memperbaiki akuntabilitas dan transparansi sistem keuangan, mengakhiri “terlalu besar untuk rugi”, melindungi pembayar pajak AS dengan mengakhiri system dana talangan, melindungi konsumen dari praktik jasa keuangan yang merugikan (Lucchetti, 2010).
5. Don't Ask, Don't Tell Repeal Act of 2010. Adalah sebuah keputusan kebijakan federal yang menetapkan proses hukum untuk mengakhiri kebijakan Don't Ask, Don't Tell (DADT) yang sejak 1993 mengizinkan gay, lesbian, dan biseksual berdinis di Angkatan Bersenjata AS asalkan mereka merahasiakan orientasi seksualnya dan pihak militer tidak mengetahui tentang hal tersebut.
6. Budget Control Act of 2011
7. American Taxpayer Relief Act of 2012
8. Mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat dalam Perang Irak.
9. Menambah jumlah pasukan tentara di Afganistan dalam usaha memburu Osama.
10. Menandatangani perjanjian pengendalian senjata New START bersama Rusia.
11. Memerintahkan intervensi militer Amerika Serikat di Libya.
12. Melaksanakan operasi militer yang berakhir pada kematian Osama bin Laden.

Presiden Barack Obama mempunyai tantangan berupa tugas yang antara lain merupakan peninggalan dari presiden

George W Bush mengenai perang terhadap upaya memburu pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda Osama bin Laden. Obama tetap bertekad untuk melanjutkan dan memenangkan perang di Afghanistan yang telah berlangsung selama delapan tahun. Adanya dua hal yang membuat Amerika Serikat memutuskan untuk tetap melanjutkan perang, yaitu pertama negeri tersebut telah menjadi tempat persembunyian Osama dan menjadi wilayah kekuasaan Al-Qaeda yang dikendalikan oleh pejuang Taliban (Wibowo, 2009).

Tidak hanya meneruskan warisan perintah dari Bush dalam hal memburu Osama, Obama pula meneruskan penerapan amandemen baru Pemerintah Amerika Serikat dalam kebijakan luar negeri berupa Program Pelepasan Visa (Visa Waiver Programme) bagi pelancong asing yang hendak masuk ke Amerika Serikat, yang berfungsi mengamankan orang-orang yang bertolak dari Iran, Irak, Suriah, dan Sudan dengan cara mewajibkan mereka untuk memperoleh visa masuk ke Amerika Serikat. Program VWP telah menjadi alat yang ampuh untuk memperkuat ekonomi dan memperbaiki keseimbangan perdagangan. Sebagaimana dilansir Arabi21 pada Minggu (24/01), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa perubahan Program Pelepasan Visa bertujuan untuk mencegah masuknya teroris. Perubahan dari prosedur yang dibuat ini sudah berlangsung sejak hari Kamis pada tanggal 21 Januari 2015 lalu. Apabila sebelumnya bahwa warga dari beberapa negara tertentu memiliki kemungkinan untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dalam urusan bisnis maupun wisata hingga 90 hari tanpa harus mendapatkan visa. Maka amandemen baru tersebut menetapkan bahwa setiap orang yang sudah pernah mengunjungi Iran, Irak, Suriah, dan Sudan dalam jangka waktu lima tahun terakhir harus memperoleh visa dan harus mengajukan permohonan visa non-imigran (Admin, 2016).

Pada bulan Januari, Presiden Obama meminta perubahan pada VWP karena dampak ekonomi dari program dan tindakan imigrasi serupa terhadap ekonomi. Dalam sebuah

pidato radio pada tanggal 21 Januari 2012, Presiden mengatakan bahwa lebih dari 1 juta pekerjaan akan tercipta pada dekade berikutnya jika Amerika Serikat meningkatkan pangsa pasar perjalanan internasional: "Kami ingin lebih banyak pengunjung datang ke sini, kami ingin mereka menghabiskan uang di sini, bagus untuk ekonomi kita, dan ini akan membantu meningkatkan bisnis yang lebih banyak perlu tumbuh dan disewa. "

Konsensus yang meningkat telah muncul bahwa meningkatkan daya saing AS untuk pasar perjalanan internasional adalah salah satu cara terbaik untuk memperkuat keseimbangan perdagangan dan menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat yang sebagian besar tidak dapat di-*outsource*. Pada tahun 2012, Presiden Obama mengeluarkan Perintah Eksklusif yang mengarahkan pengembangan rencana antar-negara untuk meningkatkan perjalanan ke Amerika Serikat, yang secara khusus "mengarahkan pemerintahan saya untuk melihat apakah kita dapat menambahkan lebih banyak negara" ke VWP. Sebelumnya, Presiden telah menyetujui undang-undang, Program Pelepasan Keamanan dan Reformasi Visa Waiver, yang diperkenalkan oleh Senator Barbara Mikulski dan Mark Kirk dan Reprs Mike Quigley dan Steve Chabot yang akan mengubah kriteria di mana negara-negara bisa dipertimbangkan untuk VWP. Senator Chuck Schumer dan Mike Lee dan Reprs Mazie Hirono dan David Dreier juga memasukkan ketentuan serupa dalam tagihan reformasi perjalanan yang lebih luas (C. Stewart Verdery, 2013, hal. 54).

Wisatawan dalam kategori berikut ini tidak memenuhi syarat untuk bepergian atau masuk ke AS berdasarkan program pelepasan visa (VWP). Warga negara VWP yang telah melakukan perjalanan ke atau pernah berkunjung di Iran, Irak, Sudan, Suriah, Libya, Somalia, dan Yaman pada atau setelah tanggal 1 Maret 2011 (dengan pengecualian terbatas untuk perjalanan tujuan diplomatik atau militer yang bertujuan untuk melayani negara VWP). Negara-negara VWP yang juga warga negara Iran, Irak, Sudan, atau Suriah. Selain itu pada

tanggal 1 April 2016, harus memiliki paspor elektronik untuk menggunakan VWP (CBP.GOV, 2017).

Setelah menjabat selama dua periode, Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan tutup masa jabatannya pada Januari 2017. Banyak hal yang telah berhasil dilakukan oleh Barack Obama selama menjabat sebagai presiden ditahun-tahun yang sebelumnya, pencapaian Presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat tersebut telah berhasil dibukukan. Delapan hal yang perlu diingat dari yang paling disorot dalam masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat keturunan Afrika tersebut antara lain adalah Jaminan Kesehatan, Perlindungan Iklim, Eliminasi Osama, Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis, Hubungan dengan Kuba, Kebangkitan Ekonomi, Perang Afghanistan dan Irak, Perjanjian Nuklir Iran (Kompas.com, 2016).